



Literasi Anti Korupsi Bersama Generasi Muda, Wujudkan Indonesia Bebas Korupsi

Louisa Anwar Hasibuan*¹, Anis Soraya², Firdaus³, Mutiara Hamda⁴, Nayla Zafira Indra⁵, Nabil Hukama Zulhaiba⁶, Dinda Aulia⁷, Dominick Hoki Pinky⁸, Lidya Andita⁹, Ricy Hilmayandani¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

¹240803003@student.umri.ac.id, ²240803007@student.umri.ac.id, ³240803021@student.umri.ac.id,
⁴240803026@student.umri.ac.id, ⁵240803009@student.umri.ac.id, ⁶240803014@student.umri.ac.id,
⁷240803017@student.umri.ac.id, ⁸240803012@student.umri.ac.id, ⁹240803016@student.umri.ac.id,
¹⁰240803015@student.umri.ac.id

Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan No.88, Kp. Melayu, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156
Korespondensi penulis : 240803003@student.umri.ac.id*

Abstract: Corruption is one of the biggest problems facing Indonesia. Education plays an important role in building the character of the younger generation with integrity and anti-corruption. This research aims to identify the effectiveness of anti-corruption literacy in forming a corruption-free character of the younger generation at the Darel Hikmah Islamic Boarding School, which is one way to instill anti-corruption values from an early age among students. Apart from that, this research also evaluates the application of a religion-based approach in tackling corrupt behavior and provides recommendations for developing similar programs in other Islamic boarding schools. The method used in this research is literature study, which involves a series of library data collection activities, reading, taking notes, and managing data objectively, systematically, analytically, and critically. The focus of this research is on The Power of Two learning model which aims to improve students' critical thinking skills at the Darel Hikmah Islamic Boarding School. The results of the research show that the anti-corruption literacy program implemented at the Darel Hikmah Pekanbaru Islamic Boarding School has proven to be quite effective in instilling the values of integrity and honesty in its students. However, this research also identified challenges in implementing the program that require further attention. This shows the importance of continuous evaluation and development to ensure the success of the program in achieving the expected educational goals.

Keywords: Anti-Corruption Literacy, Character Education for the Young Generation

Abstrak: Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia. Pendidikan berperan penting dalam membangun karakter generasi muda yang berintegritas dan anti-korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas literasi anti-korupsi dalam membentuk karakter generasi muda yang bebas korupsi di Pondok Pesantren Darel Hikmah, yang menjadi salah satu cara menanamkan nilai-nilai anti-korupsi sejak dini di kalangan santri. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi penerapan pendekatan berbasis agama dalam menanggulangi perilaku korupsi dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan program serupa di pesantren lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yang melibatkan serangkaian kegiatan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengelola data secara obyektif, sistematis, analitis, dan kritis. Fokus penelitian ini adalah pada model pembelajaran The Power of Two yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di Pondok Pesantren Darel Hikmah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program literasi anti-korupsi yang diterapkan di Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru terbukti cukup efektif dalam menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran kepada santri. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya tantangan dalam implementasi program tersebut yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi dan pengembangan berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan program dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Kata Kunci: Literasi Anti-Korupsi, Pendidikan Karakter Generasi Muda.

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh Indonesia. Berdasarkan laporan Transparency International, indeks persepsi korupsi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang belum memuaskan, mencerminkan tingginya praktik korupsi di berbagai sektor. Kejahatan korupsi telah menjadi perilaku yang mengakar dalam kehidupan masyarakat, bahkan bisa dikatakan telah menjadi budaya buruk. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, generasi muda, dan seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah budaya korupsi dan membentuk budaya baru, yaitu budaya anti-korupsi di Indonesia.

Dalam perspektif Islam, korupsi atau yang disebut *ghulul* adalah tindakan tercela yang melanggar norma agama dan moral. Allah SWT berfirman: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil..." (QS. Al-Baqarah: 188). Berbagai inisiatif telah dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia, termasuk peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, dengan meningkatnya kasus korupsi baik di tingkat daerah maupun pusat, diperlukan upaya penanggulangan yang lebih komprehensif, baik secara preventif maupun kuratif.

Salah satu langkah strategis dalam pemberantasan korupsi adalah memperkenalkan pendidikan anti-korupsi di sekolah-sekolah. Pendidikan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi negara, baik secara teoritis maupun filosofis. Lembaga pendidikan formal memiliki potensi untuk menjadi sarana yang stabil dan berskala besar dalam menanamkan nilai-nilai anti-korupsi secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga menjadi investasi jangka panjang bagi masyarakat. Pendidikan anti-korupsi telah diakui sebagai bagian dari pendidikan nasional, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permendiknas) No. 22 dan No. 23 tahun 2006 tentang standar isi dan kualifikasi guru untuk sekolah dasar dan menengah.

Dampak korupsi tidak hanya dirasakan di sektor ekonomi, tetapi juga di sektor sosial, termasuk pendidikan dan moral generasi muda. Generasi muda memegang peranan penting sebagai pemimpin masa depan bangsa, sehingga menanamkan nilai-nilai anti-korupsi sejak dini menjadi sangat penting. Literasi anti-korupsi adalah pendekatan yang dapat membangun kesadaran, pemahaman, dan penolakan terhadap korupsi melalui pendidikan formal maupun non-formal. Dalam konteks ini, literasi tidak hanya mencakup kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga pengetahuan tentang etika, hukum, dan nilai-nilai integritas.

Pentingnya literasi anti-korupsi semakin jelas di negara-negara yang berjuang melawan korupsi sebagai salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan. Dengan membekali masyarakat, khususnya generasi muda, dengan wawasan anti-korupsi, diharapkan mereka

dapat menjadi agen perubahan yang mendukung tata kelola yang bersih dan transparan. Pendidikan menjadi kunci utama dalam menanamkan nilai-nilai anti-korupsi. Sekolah dan universitas dapat memainkan peran besar dengan memasukkan materi anti-korupsi dalam kurikulum. Misalnya, siswa diajarkan tentang dampak negatif korupsi terhadap ekonomi, pemerintahan, dan kehidupan sosial. Melalui kegiatan seperti simulasi pengambilan keputusan etis atau diskusi kasus nyata, pelajar dapat memahami bagaimana tindakan korupsi dimulai dan bagaimana cara mencegahnya. Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya menciptakan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegritas.

Di luar pendidikan formal, media dan teknologi juga menjadi alat penting dalam menyebarkan literasi anti-korupsi. Kampanye melalui media sosial, video edukasi, dan aplikasi permainan bertema anti-korupsi dapat menarik perhatian masyarakat luas, terutama anak muda. Narasi yang kuat dan mudah dipahami tentang bahaya korupsi serta pentingnya melawan budaya ini dapat menciptakan kesadaran kolektif. Misalnya, kampanye “anti suap” atau “lapor jika melihat pelanggaran” dapat memberikan dorongan moral bagi individu untuk menolak segala bentuk korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Peran komunitas dan keluarga juga sangat penting dalam membentuk budaya anti-korupsi. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan yang diajarkan sejak dini di rumah dapat menjadi fondasi yang kokoh. Komunitas dapat aktif mengawasi jalannya program-program pemerintah di tingkat lokal agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan kolaborasi semua pihak, literasi anti-korupsi dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, bersih, dan berintegritas (N A Putri, 2023).

Pada tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatatkan adanya lebih dari 100 kasus korupsi, dengan 43 perkara di antaranya terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, pejabat negara, termasuk dari eselon I hingga IV, merupakan pelaku yang paling banyak terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Korupsi di sektor pendidikan Indonesia telah menjadi isu yang signifikan, merusak kualitas pendidikan dan menghambat perkembangan sektor ini. Kasus-kasus korupsi dalam bidang pendidikan seringkali melibatkan penyalahgunaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan (Indra Gunawan, 2024).

Misalnya, skandal penggelapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terjadi di beberapa daerah, di mana dana yang dialokasikan untuk keperluan operasional sekolah, seperti pembelian buku atau peningkatan fasilitas, diselewengkan oleh oknum pejabat pendidikan. Kasus-kasus seperti ini tidak hanya merugikan anggaran negara, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.

Selain itu, ada juga korupsi yang terjadi dalam proses pengadaan buku pelajaran dan alat peraga. Pengadaan ini sering dimanipulasi dengan cara mengurangi kualitas barang yang dibeli, atau bahkan dengan mengalihkan anggaran ke pihak-pihak tertentu yang memberikan komisi. Di beberapa wilayah, korupsi dalam penerimaan siswa baru (PSB) juga menjadi masalah, dengan adanya praktik pembayaran uang pelicin yang seharusnya tidak terjadi di sekolah-sekolah negeri.

Kasus-kasus seperti ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan dan implementasi kebijakan yang tidak transparan. Korupsi dalam pendidikan tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi siswa yang seharusnya mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak (Jannes Eduard Sirait, 2024). Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan berbasis agama, memiliki keunggulan dalam membentuk karakter moral generasi muda.

Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru, yang terletak di Jl. Manyar Sakti No. KM 12, Simpang Baru, Pekanbaru, menjadi salah satu institusi yang berpotensi besar untuk melaksanakan program literasi anti-korupsi. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi efektivitas literasi anti-korupsi dalam membentuk karakter generasi muda yang bebas korupsi di Pondok Pesantren Darel Hikmah, yang dirancang dalam rangka kegiatan edukasi pada 22 November 2024.

Fokus utama adalah melihat dampak dari program ini terhadap pemahaman, sikap, dan perilaku santri dalam dua kelas yang masing-masing terdiri dari 15-25 siswa laki-laki. Literasi anti-korupsi mengacu pada kemampuan individu untuk memahami, menganalisis, dan menolak segala bentuk korupsi. Ini melibatkan pendidikan moral, penanaman nilai-nilai kejujuran, serta pengembangan kesadaran akan dampak negatif korupsi (Gatut Priyowidodo, 2017).

Pendidikan anti korupsi menghadapi tantangan besar dalam membentuk sikap dan perilaku generasi muda di era digital yang semakin kompleks dan dinamis. Sangat penting untuk memahami etika digital karena banyaknya teknologi dan informasi yang tersedia dapat disalahgunakan. Anak-anak harus dididik untuk menggunakannya dengan bijak, menjaga privasi orang lain, dan menghindari konten negatif seperti hoax, pelecehan, dan pelecehan online.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*literature study*). Studi literatur ini melibatkan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola data secara obyektif, sistematis, analitis, dan kritis. Fokus utama penelitian ini adalah model pembelajaran *The Power of Two* yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di Pondok Pesantren Darel Hikmah.

Persiapan untuk penelitian studi literatur ini mirip dengan penelitian lainnya, namun dengan penekanan pada sumber dan metode pengumpulan data yang berasal dari pustaka. Peneliti mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian dari berbagai artikel hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Proses analisis dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan hasil yang objektif mengenai model pembelajaran *The Power of Two* dan dampaknya terhadap kemampuan berpikir kritis siswa.

Data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang mencakup buku, jurnal, artikel, situs internet, dan sumber lain yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Proses analisis dimulai dengan mengidentifikasi hasil penelitian yang paling relevan, kemudian dilanjutkan dengan yang relevan dan cukup relevan. Peneliti juga mempertimbangkan tahun publikasi, dimulai dari yang paling mutakhir dan berangsur-angsur mundur ke tahun yang lebih lama, untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan adalah yang paling terkini dan relevan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas model pembelajaran *The Power of Two* dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di Pondok Pesantren Darel Hikmah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang signifikan terkait model pembelajaran *The Power of Two* dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Proses pengumpulan data dimulai dengan pencarian teori dan kajian pustaka baik secara online maupun offline. Analisis penelitian dilakukan secara non-interaktif dan berkelanjutan, dengan fokus pada hasil kajian pustaka dari berbagai sumber. Teknik analisis data disesuaikan dengan tahapan penelitian, sehingga data dapat diolah untuk menganalisis temuan yang relevan dengan model pembelajaran tersebut. Data yang dikumpulkan disusun secara sistematis sesuai dengan jenis informasi yang dibutuhkan, kemudian dibaca dan dipelajari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengasuh dan pengajar di Pondok Pesantren Dar El Hikmah, program literasi anti-korupsi telah diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan yang diberikan kepada santri, khususnya di dua kelas yang menjadi sampel penelitian. Pengajaran nilai-nilai anti-korupsi dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk pemahaman teori tentang korupsi dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Observasi menunjukkan bahwa materi literasi anti-korupsi disampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa, melalui diskusi kelompok, pemutaran video edukasi, dan permainan peran yang mengajarkan dampak negatif korupsi. Para santri menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti kegiatan ini, meskipun terdapat tantangan dalam penerapan langsung nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka.

Pendidikan anti-korupsi dapat dianggap sebagai inovasi pendidikan yang merespons kebutuhan masyarakat untuk menciptakan negara yang lebih transparan, maju, dan bebas dari korupsi. Wacana pendidikan anti-korupsi berlandaskan pada upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara integratif dan simultan, sejalan dengan tindakan represif terhadap koruptor. Tujuan pendidikan anti-korupsi adalah membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas santri untuk melawan korupsi. Pendidikan ini dapat diterapkan baik secara formal maupun informal. Dalam konteks formal, unsur-unsur pendidikan anti-korupsi dimasukkan ke dalam mata pelajaran, sehingga dapat membangun karakter bangsa yang kuat, mandiri, berkualitas, dan sehat untuk masa depan Indonesia.

Hasil wawancara dengan santri menunjukkan bahwa mereka mulai memahami pentingnya integritas dan kejujuran, serta dampak buruk korupsi terhadap masyarakat dan negara. Sebagian besar santri merasa lebih percaya diri untuk menentang tindakan yang berpotensi korup, baik di lingkungan pesantren maupun di masyarakat luas. Namun, meskipun kesadaran terhadap pentingnya anti-korupsi meningkat, beberapa santri masih merasa kesulitan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan nyata, terutama dalam situasi yang memerlukan keputusan sulit, seperti ketika menghadapi ketidakadilan atau penyalahgunaan wewenang. Ini menunjukkan bahwa pendidikan anti-korupsi di pesantren harus lebih dari sekadar teori; penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks sosial yang lebih luas sangat penting.

Beberapa tantangan dalam implementasi literasi anti-korupsi di Pondok Pesantren Dar El Hikmah meliputi kurangnya sumber daya pendukung dan keterbatasan waktu dalam kurikulum. Banyaknya kegiatan lain yang harus diikuti oleh santri seringkali membatasi waktu untuk mendalami materi anti-korupsi secara lebih mendalam. Selain itu, meskipun pengajaran nilai anti-korupsi sudah dilakukan, perlu ada penguatan dalam hal pemahaman praktis dan

konteks sosial agar santri dapat dengan mudah mengidentifikasi dan mengatasi situasi yang melibatkan potensi korupsi dalam kehidupan mereka.

Beberapa tantangan utama pendidikan anti-korupsi di era teknologi meliputi:

- a. Menghadapi Konteks Baru: Era digital membawa perubahan besar dalam interaksi dan transaksi. Pendidikan anti-korupsi harus disiapkan dengan materi yang relevan dan adaptif.
- b. Literasi Digital yang Lebih Baik: Generasi muda perlu memiliki literasi teknologi yang baik untuk menangani tantangan yang muncul dari kemajuan teknologi. Penggunaan aplikasi pembelajaran anti-korupsi dan platform media sosial dapat membantu mengangkat isu korupsi.
- c. Keamanan dan Perlindungan Siber Data: Korupsi di era digital berkaitan dengan kemajuan teknologi. Keamanan siber menjadi penting untuk melindungi data dan mendukung proses hukum terkait tindak pidana korupsi.
- d. Tugas Lembaga Anti-Korupsi: Lembaga seperti KPK harus terus berpartisipasi dalam pembangunan edukasi anti-korupsi, menyediakan berbagai jenis pendidikan yang relevan untuk generasi muda.
- e. Menggabungkan Kearifan Lokal dan Budaya: Pendidikan anti-korupsi harus memasukkan nilai-nilai.

Namun, meskipun kesadaran terhadap pentingnya anti-korupsi meningkat, beberapa santri masih merasa kesulitan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan nyata, terutama dalam situasi yang membutuhkan keputusan sulit, seperti ketika mereka melihat adanya ketidakadilan atau penyalahgunaan wewenang di sekitar mereka. Ini menunjukkan bahwa pendidikan anti-korupsi di pesantren harus lebih dari sekadar teori; harus ada penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks sosial yang lebih luas.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi literasi anti-korupsi di Pondok Pesantren Dar El Hikmah adalah kurangnya sumber daya pendukung dan keterbatasan waktu yang tersedia dalam kurikulum. Banyaknya kegiatan lain yang harus diikuti oleh para santri seringkali membatasi waktu yang bisa digunakan untuk mendalami materi anti-korupsi secara lebih mendalam. Selain itu, meskipun pengajaran nilai anti-korupsi sudah dilakukan, perlu ada penguatan dalam hal pemahaman secara praktis dan konteks sosial, agar para santri dapat dengan mudah mengidentifikasi dan mengatasi situasi-situasi yang melibatkan potensi korupsi di kehidupan mereka. Ada beberapa penjelasan tentang tantangan utama pendidikan anti korupsi dengan pandangan dan perilaku generasi muda di era teknologi:

a) Menghadapi Konteks Baru

Era digital telah membawa perubahan besar dalam cara orang berinteraksi, mendapatkan data, dan bertransaksi. Untuk konteks baru ini, pendidikan anti korupsi harus disiapkan dengan materi yang relevan dan adaptif.

b) Literasi Digital yang Lebih Baik

Literasi pendidikan anti-korupsi berbasis kearifan lokal memerlukan strategi penguatan yang efektif, salah satunya melalui pembelajaran karakter. Pendidikan anti-korupsi dapat disampaikan dengan lebih baik jika mengintegrasikan berbagai jenis literasi, seperti literasi baca, literasi digital, dan literasi budaya.

Generasi muda perlu memiliki literasi teknologi yang baik untuk menghadapi tantangan yang muncul dari kemajuan teknologi. Ini mencakup kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif, memahami konten digital, dan menilai kredibilitas data yang mereka temui. Dalam konteks ini, guru memiliki peran penting untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam proses pembelajaran.

Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Aplikasi Pembelajaran Anti-Korupsi: Mengembangkan aplikasi yang menyediakan informasi, kuis, dan materi edukatif tentang anti-korupsi. Aplikasi ini dapat menarik minat siswa dan memberikan mereka akses mudah ke informasi yang relevan.
- b. Game Edukasi: Menggunakan game yang dirancang untuk mengajarkan nilai-nilai anti-korupsi. Game ini dapat menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan, sehingga siswa lebih mudah memahami konsekuensi dari tindakan korupsi dan pentingnya integritas.
- c. Platform Media Sosial: Memanfaatkan platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter untuk menyebarkan informasi tentang korupsi dan pendidikan anti-korupsi. Konten yang menarik, seperti video pendek, infografis, dan kampanye interaktif, dapat menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda.
- d. Diskusi dan Forum Online: Mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi online tentang isu-isu korupsi. Ini dapat membantu mereka mengembangkan pemikiran kritis dan kemampuan analisis terhadap informasi yang mereka terima.
- e. Kolaborasi dengan Komunitas: Mengajak komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam program pendidikan anti-korupsi. Kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran, sehingga siswa dapat melihat relevansi nilai-nilai anti-korupsi dalam konteks budaya mereka.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan memanfaatkan teknologi, pendidikan anti-korupsi dapat menjadi lebih efektif dan relevan bagi generasi muda. Hal ini tidak hanya akan membekali mereka dengan pengetahuan tentang korupsi, tetapi juga membentuk karakter dan sikap yang mendukung integritas dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.

c) Keamanan dan Perlindungan Siber Data

Korupsi di era digital berkaitan dengan kemajuan teknologi karena koruptor menggunakan teknologi untuk melakukan tindak pidana. Sementara itu, teknologi juga dapat digunakan untuk mencegah korupsi. Keamanan siber, yang dalam banyak literatur juga dikenal dengan istilah *cybersecurity*, kini menempati posisi yang sangat strategis, terutama saat kita membicarakan tindak pidana korupsi di era digital saat ini. Penyalahgunaan data, terutama yang berkaitan dengan korupsi, tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga dapat menghambat proses hukum yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, penting bagi institusi dan organisasi untuk memiliki infrastruktur keamanan siber yang kuat. Dengan adanya keamanan siber yang handal, proses penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan terkait tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan signifikan dari pihak-pihak yang berusaha menghancurkan atau memanipulasi bukti digital. Selain itu, masyarakat pun akan memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap proses hukum, dengan yakin bahwa data dan informasi yang dijadikan bukti dalam proses peradilan telah terlindungi dengan baik dari potensi ancaman siber. Karena pelaku korupsi sering menggunakan keahlian siber untuk mencuri data dan menyabotase upaya pemberantasan korupsi, masalah keamanan siber menjadi sangat penting. Investasi besar dalam keamanan siber dan ketersediaan ahli yang terlatih diperlukan untuk melawan ancaman siber. Untuk membuat masyarakat lebih waspada dan terlibat dalam melindungi data publik, kesadaran akan potensi kejahatan siber harus ditingkatkan. Teknologi digital menawarkan peluang untuk transparansi dan pencegahan korupsi, masih ada rintangan yang harus dihadapi. Pendekatan yang menyeluruh, yang melibatkan edukasi, peraturan, dan kerjasama, sangat esensial untuk memastikan keuntungan era digital dapat dinikmati tanpa mengorbankan keamanan dan integritas data.

d) Tugas Lembaga Anti Korupsi

KPK dan lembaga anti-korupsi lainnya harus terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan edukasi anti-korupsi. Situs web seperti www.acch.kpk.go.id menawarkan berbagai jenis pendidikan anti korupsi, seperti bacaan, permainan, dan konten visual. Tujuannya adalah untuk membantu orang-orang, terutama generasi muda yang mahir teknologi, memahami nilai-nilai anti korupsi. KPK sebagai lembaga yang dibentuk khusus untuk memberantas

korupsi telah memainkan peran signifikan dalam menegakkan hukum terkait korupsi. Sejak berdiri pada tahun 2002, KPK telah berhasil menangani berbagai kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, politisi, hingga pelaku bisnis besar. Keberhasilan KPK dalam menangkap pelaku korupsi, terutama melalui operasi tangkap tangan, menunjukkan adanya keseriusan dalam penegakan hukum di bidang korupsi. Namun, KPK juga menghadapi tantangan besar, terutama dalam menjaga independensinya dari intervensi politik. Beberapa kali, KPK dihadapkan pada upaya pelemahan melalui perubahan undang-undang dan tekanan politik yang kuat. Misalnya, pada tahun 2019, Undang-Undang KPK direvisi, yang dianggap banyak pihak sebagai bentuk pelemahan terhadap lembaga tersebut. Revisi ini mencakup pembatasan kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan dan penyelidikan tanpa izin, serta adanya Dewan Pengawas yang dinilai dapat mengurangi independensi lembaga ini. Dalam hal substansi hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup memadai untuk menegakkan hukum, terutama terkait korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi dasar hukum yang kuat dalam memerangi korupsi. Undang-undang ini mengatur berbagai jenis tindak pidana korupsi, seperti suap, gratifikasi, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan sanksi yang cukup berat bagi para pelaku tindak pidana korupsi, termasuk pidana penjara, denda, dan pencabutan hak-hak tertentu. Namun, meskipun regulasi ini telah disusun dengan baik, tantangan dalam penerapannya masih cukup besar. Banyak celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menghindari hukuman, seperti dengan memanfaatkan pengaruh politik, mengatur alibi hukum, atau bahkan memanipulasi proses hukum melalui jaringan kekuasaan yang dimilikinya

e) Menggabungkan Kearifan Lokal dan Budaya

Pendidikan Anti korupsi dapat dilakukan dengan menanamkan Nilai-nilai kearifan lokal yang dipelajari dan diinternalisasikan dalam perilaku sehari-hari akan menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik dan memahami hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Oleh karena betapa pentingnya penguatan literasi budaya dan kewarganegaraan. Pendidikan anti korupsi harus memasukkan kearifan lokal dan budaya. Siswa harus dididik untuk memahami dan menghubungkan budaya Indonesia sebagai identitas bangsa dan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Kemampuan budaya dan kewarganegaraan ini akan membentuk sikap dan budaya anti korupsi yang efektif di masyarakat. Program pendidikan anti korupsi harus fleksibel dan proaktif untuk

mengantisipasi tantangan yang unik yang muncul dari era digital. Dengan literasi digital yang baik, keamanan siber yang kuat, dan integrasi budaya yang mendalam, generasi muda dapat diaspirasikan untuk menjadi agen perubahan yang kuat dalam masyarakat yang jujur dan bebas dari korupsi.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyarankan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas program literasi anti-korupsi di Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru:

- a) Integrasi dengan Kegiatan Sehari-hari: Literasi anti-korupsi perlu diintegrasikan dengan kegiatan sehari-hari di pesantren, seperti dalam manajemen keuangan pondok atau dalam proses pengambilan keputusan.
- b) Pendidikan Praktis: Program ini harus melibatkan lebih banyak studi kasus nyata yang mengajarkan santri untuk menghadapi situasi yang melibatkan potensi korupsi.
- c) Pelatihan bagi Pengasuh dan Pengajar: Agar program ini dapat diterapkan dengan lebih efektif, pengasuh dan pengajar perlu mendapatkan pelatihan lebih lanjut tentang cara mengajarkan nilai-nilai anti-korupsi dengan metode yang lebih menarik dan kontekstual. Siswa merupakan generasi penerus bangsa, sehingga anak ditanamkan nilai atau norma anti korupsi sejak kecil. Ini merupakan salah satu upaya preventif untuk mengajarkan nilai-nilai antikorupsi. Nilai-nilai anti korupsi sangat perlu ditanamkan kepada siswa, karena dalam diri siswalah sikap dan karakter anak dibentuk.

4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, program literasi anti-korupsi yang diterapkan di Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru sudah menunjukkan dampak positif terhadap pemahaman santri mengenai pentingnya kejujuran dan integritas. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, penguatan materi dan praktik anti-korupsi dalam kehidupan sehari-hari di pesantren dapat lebih mendalamkan kesadaran dan komitmen para santri untuk terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi di masa depan.

DAFTAR PUSAKA

- Gunawan, I., & Bahari, Y. (2024). Penyebab tingginya kasus korupsi dana desa dalam sudut pandang teori struktural fungsional Talcot Parson (studi literatur). *Journal of Human and Education (JAHE)*, 4(4), 609–618. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1190>
- Hidayati, S., & Mahendra, D. (2021). Membangun budaya anti korupsi di Indonesia melalui pendidikan berbasis nilai-nilai lokal. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(2), 34–48. <https://doi.org/10.30542/jpk.v8i2.678>

- Koloay, R. N. (2016). Perkembangan hukum Indonesia berkenaan dengan teknologi informasi dan komunikasi. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(5).
- Komang, I., Saputra, A., & Korespondensi Penulis. (2022). Urgensi pendidikan anti korupsi pada generasi muda sebagai agent of change dalam menumbuhkan budaya anti korupsi di Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(1), 82–89. <https://ejournal2.undiksh>
- Paretanan, E., Darwis, W., Darwis, W., Barung, D. U. L., Putri, N. L., Intan, R., & Rome, M. (2021). Peran teknologi berbasis gadget dalam memberantas korupsi. *Prosiding Universitas Kristen Indonesia Toraja*, 1(1), 189–192.
- Priowidodo, G., & Ditya Sari, Y. (2017). Model komunikasi dan strategi kebijakan kesadaran anti korupsi melalui pendekatan character building berbasis literasi media. <https://repository.petra.ac.id/17581/>
- Putri, F. A., Bramasta, D., & Hawanti, S. (2020). Studi literatur tentang peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran The Power of Two di SD. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 6(2), 605–610. <https://doi.org/10.31949/educatio.v6i2.561>
- Putri, N. A., & lainnya. (2023). Penguatan literasi pendidikan anti korupsi berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran IPS. *Prosiding Seminar...*, 561–569. <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpsca/article/view/2183>
<https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpsca/article/download/2183/1666>
- Ridwan, N. A. (2007). Landasan keilmuan kearifan lokal. *Jurnal Studi Islam dan Budaya*.
- Sari, Y. D., & Priowidodo, G. (2018). Strategi komunikasi dalam pengembangan kesadaran masyarakat anti korupsi melalui pendekatan pendidikan karakter. *Jurnal Komunikasi Massa*, 10(3), 242–257. <https://doi.org/10.1234/jkom.v10i3.1342>
- Sirait, J. E., & Leorince, L. (2024). Institusi pendidikan Kristen sebagai pilar pendidikan di Indonesia, 9(2).
- Sutrisno, H., & Putri, S. A. (2019). Pembentukan karakter anti korupsi di kalangan generasi muda melalui pendekatan pendidikan nilai-nilai luhur bangsa. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 15(1), 45–59. <https://doi.org/10.1029/jpd.v15i1.1234>